

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., dkk. (2016). Kesadaran wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, N. K., & Sudjana, I. B. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan dan kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Daerah*, 6(2), 85–97.
- Dwijayanti, R., Prasetyo, B., & Wulandari, A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 35–48.
- Erlina, E., Siregar, H., & Muda, I. (2018). The effect of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance. *International Journal of Economic Research*, 15(3), 231–240.
- Giawa, H., Siregar, R., & Tarigan, J. (2022). The influence of taxpayer awareness on motor vehicle tax compliance. *Journal of Public Finance Studies*, 4(2), 65–74.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto, A., & Lingga, M. (2024). Pengaruh kualitas kebijakan kepatuhan terhadap peningkatan realisasi pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(2), 115–128.
- Hidayani, S., & Lubis, A. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 10(1), 45–56.
- Irsan, M. (2025). Taxpayer awareness and regional tax revenue growth. *Journal of Fiscal Policy and Regional Finance*, 7(1), 22–34.
- Kaur, P., Singh, R., & Sharma, A. (2025). Tax compliance policy and its impact on regional tax revenue performance. *International Journal of Public Finance and Taxation*, 7(1), 45–59.

- Kusuma, D., & Kristianto, B. (2025). Determinants of motor vehicle tax revenue in regional governments. *Journal of Regional Economic Studies*, 6(1), 71–83.
- Laksmiyaningwang, T. (2025). Simplification of tax procedures and its impact on regional tax revenue. *Journal of Regional Fiscal Policy*, 6(1), 72–86.
- Levis, L. R. (2013). *Metode Penelitian Perilaku dan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, R., Nasution, A., & Harahap, M. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 5(2), 91–103.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muryani, S., & Rukaiyah, S. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Administrasi Keuangan Daerah*, 10(2), 88–99.
- Rahmawati, S. (2022). Pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–56.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, R. (2024). Strategi komunikasi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 101–115.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani, D., & Sitorus, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(1), 55–67.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Sanksi Administrasi, dan Pembebasan Pajak Progresif.



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114

Jl. Prof Dr. Herman Johannes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.

Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 0229/WM.H16/SK.CP/2026

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Epifania Angelika Cipriano
NIM : 33122102
Fakultas/Prodi : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Simon Sia Niha, SE, M.Si
2. Antonius Y.W Timuneno, S.Akun, M.S.A
Judul Skripsi : **PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA UPTD PENDAPATAN DAERAH WILAYAH
KABUPATEN MALAKA**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **19% (Sembilan Belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 23 Februari 2026

Kepala UPT Perpustakaan,

Damlanus Daml, S.Ptk.